

BPK RI Kalbar MoU Bersama Pemprov Kalbar

PENANDATANGANAN MOU
ANTARA BPK RI DENGAN PEMERINTAH
SE-PROVINSI KALIMANTAN



MoU

Gubernur Kalbar, Cornelis menyerahkan hasil kesepakatan MoU bersama Ketua BPK RI Perwakilan Kalbar, Adi Sudibyo, Kamis (16/6). FOTO Andika Lay / Borneo Tribune.

Andika Lay

Borneo Tribune, Pontianak

Untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada pemerintah daerah dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalbar, Kamis (16/6) melakukan *memorandum of understanding (MoU)* bersama Pemerintah Kabupaten se Kalbar.

Hadir dalam MoU ini, Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, Gubernur Kalbar, Cornelis, Ketua BPK RI Perwakilan Kalbar, Adi Sudibyo, Sekda Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie, Kasdam XII Tanjungpura, Brigjen Armyn Angkasa Aliyang, Bupati dan Walikota se Kalbar.

Gubernur Kalbar, Cornelis mengatakan, dirinya sangat menyambut positif langkah BPK RI yang melakukan kerjasama dalam mengawasi pengelolaan

keuangan negara, dan MoU ini merupakan sebuah langkah pembinaan BPK RI terhadap Keuangan Negara yang dikelola oleh Provinsi maupun masing-masing Kabupaten/Kota.

"Kelolalah keuangan negara ini dengan baik dan benar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan jangan asal main pakai saja, tidak bisa dipertanggung jawabkan," kata Cornelis, saat menyampaikan sambutannya di hapat Ketua BPK RI.

Dikatakan Gubernur, setiap anggaran yang dikelola, baik pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota harus sesuai dengan usulan dan jangan main asal usul semata dalam pengelolaan keuangan negara. "Setiap keuangan negara yang digunakan, harus dipertanggung jawabkan dan disiap di periksa BPK RI," ingatnya.

Ia juga menambahkan, hal lain yang kurang dari pengelolaan keuangan negara adalah kurang disiplinnya dalam membuat laporan.

Padahal laporan penggunaan keuangan merupakan faktor penting dalam proses pemeriksaan yang dilakukan BPK. "Untuk itu, harus ada upaya tegas agar setiap penggunaan keuangan disertai dengan laporannya," pesanya.

Sementara itu, Ketua BPK RI Hadi Poernomo mengatakan MoU yang dilaksanakan ini merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan sinergi antara BPK RI dengan para pemangku kepentingan, termasuk diantaranya, pemerintah daerah.

"Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, kami mendapat kewenangan meminta data atau dokumen kepada pihak yang diperiksa (auditee)," jelas Hadi Poernomo.

Dijelaskan Hadi, untuk mempermudah perolehan data atau dokumen, saat ini BPK RI telah memprakarsai pembentukan pusat data dengan auditee melalui strategi link and match.

"Saya harap, sinergi BPK RI dengan Auditee dapat mengurangi KKN secara sistematis, dan mendukung optimalisasi penerimaan negara, dan mendukung efisiensi dan efektifitas pengeluaran negara," harapnya.

Apabila semua ini bisa terwujud, dirinya juga dapat berkeyakinan, maka dirinya optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara akan lebih cepat terwujud, dan dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Disisi lain, Ketua BPK RI Perwakilan Kalbar, Adi Subidyo menjelaskan melalui metodologi ini, pemeriksaan dengan memanfaatkan teknologi informasi akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. "Bagi kami, sistem ini akan memberikan keuntungan, pemeriksaan akan lebih efektif, dan cakupan pemeriksaan akan lebih luas, dan biaya pemeriksaan lebih hemat, serta proses dan penyelesaian pemeriksaan akan lebih cepat," katanya. □